

PENGEMBANGAN ASPEK MORAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SD DAN SMP: RESPONS ATAS REALITAS KEPRIHATINAN MORAL

Suharno

*Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPS Universitas Negeri Yogyakarta
Suharno1968@yahoo.com*

Abstract

The reality of Indonesian people's life experienced the phenomena of depleted horizon moralities politically, legally, socially, and culturally. Civic education and learning process in the classroom could be a locomotive for moral improvement for Indonesian people. The crucial point in acting or doing something is not gun but man behind the gun. So teacher is the most important actor in this endeavor.

Keywords: Civic Education, moral improvement.

PENDAHULUAN

Tak dapat disangkal, realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia mengalami fenomena semakin menipisnya horizon moralitas. Gejala demikian hampir merata di berbagai bidang, semisal politik, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Menggunakan sudut pandang yang lain pun tidak jauh berbeda, publik dan privat misalnya, juga mengalami gejala yang sama. Batas baik dan buruk, hitam dan putih, *haq* dan *batil*, semakin disumirkan dalam tata masyarakat kita.

Kondisi demikian menuntut kita untuk mencermati secara serius akar persoalan dari gejala tersebut dan bagaimana upaya-upaya kita untuk mengatasi persoalan dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak, secara akademis kita melakukan telaah-telaah kontekstual atas fenomena demikian, untuk kemudian dicari solusi yang komprehensif.

Masyarakat memiliki ekspektasi yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Mereka secara sengaja menyandarkan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah mereka ke “pundak” dunia

pendidikan. Dalam struktur masyarakat yang sangat sederhana, orang alim (yang banyak tahu) sering kali dijadikan referensi dalam mengatasi problema hidup yang mereka alami. Perilaku buruk yang ditunjukkan oleh orang tak berpendidikan acap diwajarkan. Tidak demikian halnya jika dilakukan oleh orang berpendidikan.

Dengan demikian, pendidikan harus memiliki andil yang jelas dalam melakukan perubahan, dalam makna yang positif. Tak terkecualikan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang sama, meski bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya bermakna bahwa memasrahkan perbaikan moral bangsa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah jelas merupakan hal mustahil.

PEMBAHASAN

Pembacaan atas Keprihatinan Moral

Secara terminologi, kata moral dipersamakan dengan etika, sebab secara etimologis keduanya memiliki akar kata yang hampir sama (K Bertens, 2005, pp. 3–7). Jadi di dalam makalah ini dua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Sangat jamak

penyimpangan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ukuran benar salahnya tindakan seorang manusia seringkali diabaikan dan bahkan dilanggar. Hal itu yang seringkali tampak dalam media publik kita, baik cetak maupun elektronik. Tayangan-tayangan kriminalitas di TV-TV, semacam *Patroli*, *Buser*, dan sebagainya merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Pembunuhan sebagai satu kejahatan terbesar manusia atas manusia lainnya jadi tampilan sehari-hari (Kees Bertens, 2003).

Kenyataan yang lain adalah maraknya korupsi. Beberapa lembaga *survey* memberikan gambaran relatif gamblang tentang keakutan korupsi di Indonesia. Di antaranya, hasil riset *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* (2016) tahun 2016 menempatkan Indonesia skor 8.00 dari skor 0 terbaik dan skor 10 terburuk. Sedangkan dari sumber *Transparency International (TI)* Indonesia, *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia pada tahun 2015 menempati peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei, dengan nilai 36 (Transparency International, 2015). Angka-angka tersebut diyakini hanyalah merupakan fenomena gunung salju. Tampak di muka hanyalah sebagian kecil dibandingkan dengan bagian lainnya yang terselubung.

Apa yang terjadi dengan masyarakat kita, bangsa Indonesia? Ada penyakit sosial yang sangat sulit untuk disembuhkan. Di antaranya oleh karena permissivitas, kejiwaan tidak mau susah-susah memfilter. Pertimbangan-pertimbangan moral logis sering tidak jalan. Di samping itu, hukum sebagai pengawal etika publik seringkali gagal menjadi alat perubahan masyarakat (*tool of social engineering*). Hal tersebut jelas menjadi sebuah ironi tersendiri bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa

besar, agamis, santun, gotong royong, dan adjektif positif lainnya, sementara di sisi lain bangsa ini juga dikenal dengan sarang korupsi dan kolusi, nepotisme dan kongkalikong *perkoncoan*, tawuran, dan beberapa adjektif negatif lainnya. Hal ini selayaknya menjadi keprihatinan bersama.

Dimana Pendidikan Menempatkan Diri?

Pendidikan idealnya merupakan jalan terang bagi masyarakat yang dihadapkan pada kejumudan. Ketika kita nyaris tersesat, pendidikan seharusnya dapat menunjukkan jalan terang. Saat gelap menyergap kita, pendidikan idealnya memberikan obor yang mencerahkan.

Pendidikan dapat didefinisikan dalam tiga wilayah arti, luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam lingkup yang luas, pendidikan dapat dimaknai sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hidup dalam segala lingkungan. Sedangkan definisi pendidikan dalam arti yang sempit merujuk pada pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan dalam lingkup ini dapat didefinisikan sebagai segala pengajaran yang diupayakan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak atau remaja peserta didik agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Dalam lingkup luas terbatas, pendidikan dapat dimaknai sebagai segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung sepanjang hayat, baik di dalam maupun di luar sekolah atau lembaga pendidikan formal, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan secara tepat dalam berbagai lingkungan kehidupan pada masa

yang akan datang (Mudyahardjo, 2001, pp. 3–6).

Pendidikan merupakan rahim masyarakat atau bahkan rahim peradaban. Pendidikan berperan melahirkan suatu model masyarakat tertentu, dan mengawali transformasi masyarakat ke pola yang lebih berkeeseimbangan. Dengan peran demikian, sangat jelas bahwa pendidikan harus senantiasa bersih, termasuk dalam dirinya sendiri. Pendidikan harus bebas dari syahwat patologis dan demagogis.

Repotnya, dalam “daging” dunia pendidikan kita masih tertancap beberapa “duri” yang menyulitkannya untuk menjalankan peran-peran idealnya. Aspek filosofi, subjek pembelajaran, sumber daya guru, dan beberapa aspek lainnya masih juga mewujud sebagai persoalan-persoalan internal pendidikan. Realitas ini seakan memperkuat kegelisahan Paulo Freire dan Ivan Illich sebagaimana dikutip Fakih (O’Neill, 2001, p. x) soal dunia pendidikan pada dekade yang bersamaan menyampaikan kritik pedas sekaligus menyadarkan banyak orang bahwa pendidikan yang selama ini dianggap sakral dan penuh kebajikan, ternyata mengandung juga apa yang mereka sebut “penindasan”.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai

Pendidikan Kewarganegaraan yang belakangan dikembangkan dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, sangat berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan paradigma lama. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru mengalami perubahan dalam beberapa aspeknya; visi, misi, substansi materi, strategi pengajaran, serta performance-nya. Dalam paradigma lama, Pendidikan Kewarganegaraan mewujud sebagai

indoktrinasi kepentingan penguasa dan standar-standar moral secara monologis.

Yang kental membedakan Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru dengan paradigma yang lama adalah upaya untuk mengembalikan Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam jalur ilmu sebagai bidang kajian yang terbuka, subjek pembelajaran dan pendidikan, dan bidang ilmu yang independen dari intervensi dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan paradigma baru tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengambil peran dalam rangka konstruksi, rekonstruksi, maupun resolusi persoalan-persoalan yang muncul di berbagai sektor kehidupan Bangsa Indonesia, melalui pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

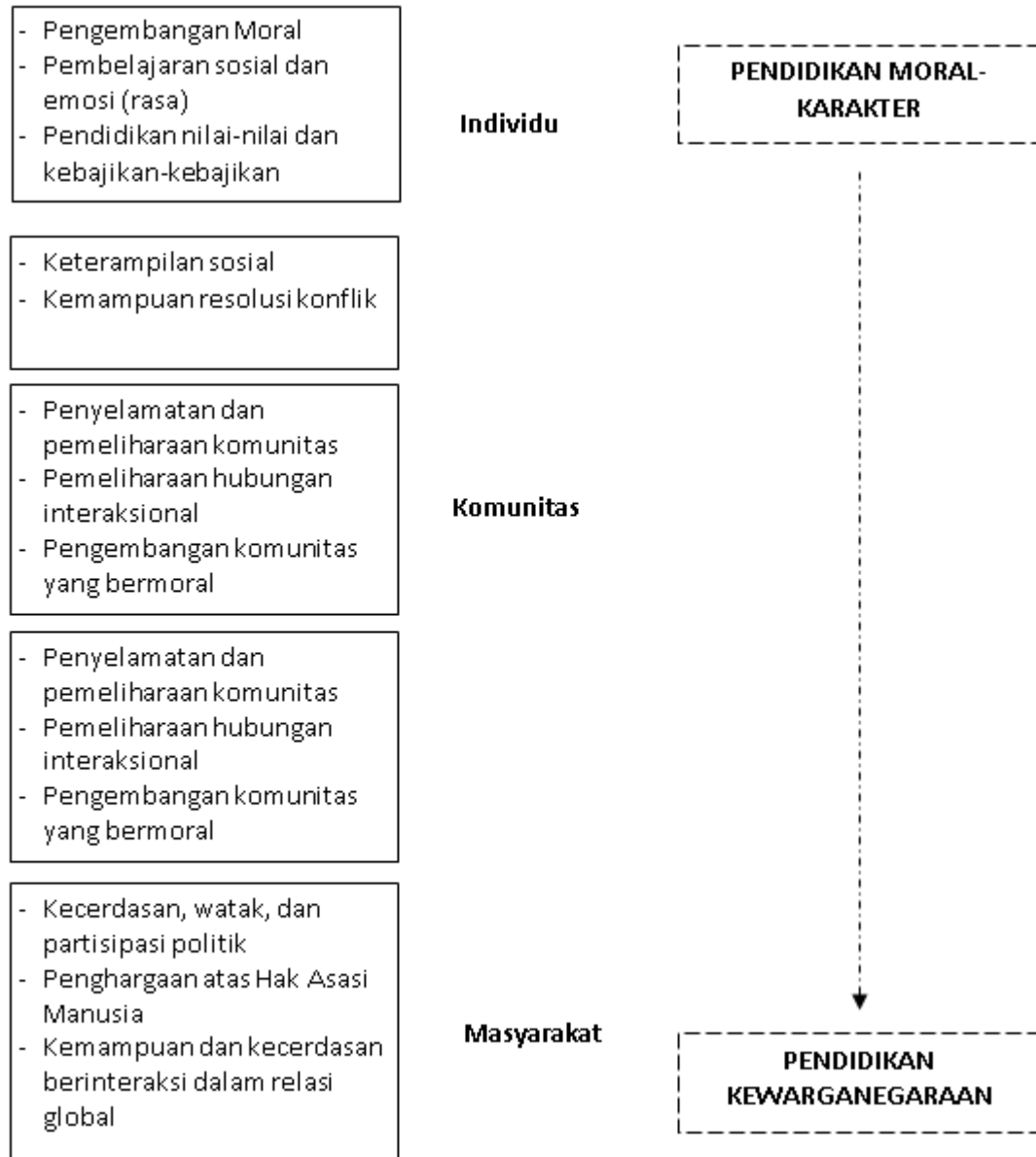
Pada dasarnya pendidikan nilai merupakan salah satu komponen epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan. Daniel Dakhidae (Halili, 2003, p. 6) mempertegas bahwa salah satu peran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah memberikan panduan penanaman nilai-nilai ideologis yang dianggap tinggi oleh suatu bangsa bagi generasi penerusnya, menjadikan manusia *homo novi ordinis*, yaitu manusia yang telah mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar, dan berkebaikan sejati .

Salah satu nilai yang dominan dipelajari bersama dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah etika atau moral. Pada sisi ini, pembelajaran etika dalam Pendidikan Kewarganegaraan meliputi tiga kategori sekaligus, yakni etika deskriptif, etika normatif dan metaetika. Ketiga kategori etika tersebut merupakan subjek ajar Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai pendidikan moral atau pendidikan karakter.

Pendidikan moral memiliki keterkaitan gradual dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tergambar berikut.

Gambar Keterkaitan Gradual Pendidikan Moral dengan Pendidikan Kewarganegaraan



Sumber: (Alberta Education, 2005).

Membahas soal Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif demikian, kita teringat pada dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada fasenya sebagai pendidikan moral, yang dalam kurikulum formal disebut sebagai Pendidikan Moral Pancasila. Harus secara tegas kita katakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada fase perkembangan tersebut secara substantif

tidak benar-benar sebagai pendidikan moral. Sebab, pembelajaran di dalamnya hanya mencekoki moralitas-moralitas privat kepada peserta didik, sementara pada saat yang bersamaan mereka dipalingkan dari persoalan-persoalan etika publik, seperti soal korupsi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, penyelewengan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat

negara, monopoli kesejahteraan ekonomi oleh konglomerasi dan lain sebagainya. Pembelajaran pun bersifat strukturalis dan mekanistik yang menekankan pada luaran berupa hafalan verbal

Lokomotif Perubahan Moral

Meskipun korupsi, monopoli, pembunuhan, perkosaan, pencurian dan lain sebagainya marak, kita sangat menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada pendidikan koruptor, pembunuh, pemerkosa, perampok, dan semacamnya dalam sistem pendidikan kita. Yang membuat fenomena tersebut jelas kontribusi banyak aspek secara kompleks. “Memerangi” patologi tersebut jelas tidak dapat mengandalkan satu bidang tertentu dalam sistem pendidikan kita. Tidak juga kepada Pendidikan Kewarganegaraan.

Namun, secara objektif dalam sudut pandang keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengambil porsi yang cukup besar untuk pembangunan karakter warga Negara yang sekaligus berarti perubahan moral mereka (sekali lagi, dalam konotasi yang positif). Pendidikan dapat mengambil inisiatif dan kepeloporan dalam misi tersebut. Sangat mungkin, banyak pihak akan menyoal “bukankah sejarah membuktikan kalau PMP sebagai pendidikan nilai gagal?” Namun struktur keilmuan yang dimiliki Pendidikan Kewarganegaraan saat ini harus membuktikan sebaliknya. Kompetensi, indikator, metode, dan evaluasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di satuan-satuan pendidikan dasar dan menengah telah menampakkan karakter yang jauh lebih ideal secara keilmuan daripada fase-fase sebelumnya.

Satu hal yang akan sangat menentukan pada akhirnya adalah guru. Kualitas tenaga pengajar merupakan komponen penting

dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadi lokomotif perubahan moral. Karakter guru (baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun profesi) menjadi salah satu dari anasir pokok yang menentukan efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan dan meningkatkan moralitas subjek belajar. Di samping itu, sinergi guru dengan keluarga peserta didik harus terus dilakukan. Sebab, sangat kecil kemungkinan pendidikan di sekolah akan berhasil tanpa dukungan pendidikan di sekolah, sebagaimana juga hampir tidak mungkin berharap keberhasilan sepenuhnya keberhasilan pendidikan di sekolah dan keluarga, tanpa dukungan yang sinergis dari pendidikan di masyarakat.

Beberapa karakter penting dan kemampuan sinergi dengan keluarga yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dalam penanaman karakter bagi peserta didik adalah sebagai berikut.

- 1) Menjaga konsistensi. Perilaku tidak konsisten pada guru akan menjadi persoalan tersendiri bagi peserta didik, terutama pada usia-usia awal pendidikan anak (SD-SMP).
- 2) Memberikan struktur dan direksi bagi kehidupan peserta didik. Penanaman nilai tertentu tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Oleh karenanya guru harus mampu membuat apa yang diajarkan mengarahkan kehidupan riil mereka.
- 3) Menaruh harapan besar kepada peserta didik. Semakin tinggi harapan seorang guru atas muridnya tentang apa yang diajarkannya, semakin tinggi pula capaian sang murid. Menghadirkan kehidupan keluarga dalam pembelajaran. Penanaman nilai-nilai tertentu harus diberikan gambaran konkrit yang sangat dekat dengan peserta didik. Lingkungan yang paling dekat dengan mereka adalah lingkungan keluarga. Menciptakan suasana keluarga dalam pembelajaran

- merupakan sesuatu yang layak diupayakan.
- 4) Positif terhadap anak didik dan keluarganya. Pendidik yang baik akan memperlakukan anak didik sebagai layaknya anak dan orang tua sebagai partner dalam mendidik anak. Mengambil pertimbangan subjektif sepihak dalam mengatasi persoalan anak didik jelas bukan hal yang positif.
 - 5) Empati terhadap kondisi anak. Mengenali karakter anak dan mendalami pendiriannya menjadi modal penting bagi seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai selama pembelajaran.
 - 6) Mengintensifkan komunikasi dengan para orang tua. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya menanamkan nilai, dengan mempertimbangkan karakter peserta didik.
 - 7) Fleksibel dan realistis dalam menaruh harapan terhadap orang tua. Guru harus

baik, tapi orang tua peserta didik tidak selalu baik. Hal ini harus disadari juga oleh para guru agar mereka bisa menanamkan nilai-nilai tertentu secara terukur.

- 8) Membuat sekolah lebih terbuka dan tidak intimidatif. Pembelajaran yang diterapkan guru harus familiar, sehingga tidak menakutkan, dan lebih terbuka sehingga peserta didik tidak terkungkung dalam eksklusivitas sempit (Kaplan, 1992)

Pengembangan Aspek Moral Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SD dan SMP

Mengacu pada Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama) adalah sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Aspek Moral Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SD dan SMP

Jenjang Pendidikan	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan sikap sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila. - Mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol- simbol Pancasila di rumah dan sekolah. - Melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila. - Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak dan kewajiban, persatuan dalam keberagaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara. - Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat. - Semangat kebersamaan dalam keberagaman. - Persatuan dan kesatuan bangsa. - Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. - Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara.

Jenjang Pendidikan	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah, sekolah dan masyarakat. - Menunjukkan sikap baik sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak dan kewajibannya, dan kebhinnekatunggalikaan sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. - Melaksanakan kerja sama dengan teman dalam kebersamaan dan keberagaman di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar. - Menjelaskan nilai dan moral Pancasila, makna hak, kewajiban dan tanggung jawab, manfaat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. - Menunjukkan sikap kebersamaan dalam keberagaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; patuh terhadap tata tertib dan aturan; bertanggung jawab dan rela berkorban; semangat kebhinnekatunggalikaan. - Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural. - Persatuan dan kesatuan - Moralitas sosial dan politik warga negara/pejabat negara, dan tokoh masyarakat. - Nilai dan moral Pancasila. - Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. - Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan. - Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa. - Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari.

Jenjang Pendidikan	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
Sekolah Menengah Pertama	<p>sama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. - Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. - Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. - Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. - Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan. - Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif. - Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya. - Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. - Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. - Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI. - Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. - Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. - Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan. - Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat. - Aspek-aspek pengokohan NKRI.

Jenjang Pendidikan	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
	- Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan.	

Sumber: Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Aspek-aspek dalam ruang lingkup tersebut mensyaratkan kepribadian dan karakter yang hebat. Kualitas keterlibatan dan partisipasi anak di dalam berbagai konteks mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sampai pergaulan internasional sangat ditentukan oleh kualitas karakter, kepribadian, dan perilakunya.

Dengan demikian, seluruh aspek dalam ruang lingkup tersebut sebenarnya membuka ruang bagi guru untuk mengembangkan aspek moral. Apalagi di dalam K-13 terdapat beberapa Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) yang digariskan untuk tingkat Sekolah Dasar meletakkan dasar pengembangan moralitas dan kepribadian (*character education*) dalam pembelajaran. Untuk SMP, aroma pengembangan karakter dan kepribadian dapat “tercium” pada beberapa kompetensi sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas.

Yang menjadi tantangan bagi guru kemudian adalah bagaimana membelajarkan aspek moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud, baik di SD maupun SMP. Secara teoritik, pembelajaran aspek moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus menekankan pada relevansi dan efektivitas. *Local content* dalam hal ini sangat dimungkinkan. Metode pembelajaran yang diterapkan harus efektif, misalnya dengan *modeling*, *role-playing*, dan

sebagainya. Sedangkan metode evaluasi juga harus dapat mengukur apa yang semestinya diukur dalam pendidikan nilai tersebut, misalnya pengamatan (*observasi*), pemantauan (*monitoring*) dan catatan perkembangan (*anecdotal records*).

Secara praktis, pengembangan aspek moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya dilakukan dengan mengembalikan pembelajaran dari yang selama ini (lebih tepatnya belakangan ini) ditekankan pada olah pikir ke penekanan pada olah rasa. Pendidikan moral seyogianya tidak sekadar berpijak pada paradigma metodik “...apa yang kamu pikirkan...” akan tetapi lebih pada “...apa yang kamu rasakan...” Hal demikian tentu lebih relevan untuk membangun sikap loyalitas, menghormati, tanggung jawab, kesetiakawanan sosial (solidaritas), empati dan sebagainya.

SIMPULAN

Demikianlah, Pendidikan Kewarganegaraan dan pembelajarannya di kelas dapat (sekali lagi dapat) menjadi lokomotif bagi perubahan moral masyarakat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapakah kita menjadikannya sebagai lokomotif perubahan moral? Penulis termasuk yang berkeyakinan bahwa yang paling menentukan suatu hasil bukanlah “*the gun*”, tapi “*man behind the gun*”: orang, dan

bukan alat. Jadi, guru adalah salah satu aktor sangat penting.

Dalam dekadensi moral yang sangat kompleks, berlebihan memang kalau hanya berharap kepada Pendidikan Kewarganegaraan. Semua bidang ilmu pada dasarnya berkewajiban menanamkan nilai-nilai moral. Ekonomi, hukum, kedokteran, politik, teknik, dan bidang lainnya memiliki keniscayaan untuk menanamkan nilai moral agar terlahir ekonomi atau pengusaha, aparat hukum, pejabat negara, dan sebagainya yang moralis. Jika demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu akan indah. Walaupun sangat mudah diucapkan dan sulit dalam pelaksanaan namun akan menjadi harapan bagi masa depan kehidupan selama masih ada orang-orang yang gigih menyeru kebajikan-kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberta Education. (2005). *The heart of the matter: character and citizenship education in Alberta schools*. Edmonton, Alberta: Alberta Education.
- Bertens, K. (2003). *Keprihatinan moral, telaah atas masalah etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2005). *Etika* (9th ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halili. (2003). Optimalisasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun dan mengembangkan nasionalisme Indonesia. In *Makalah dalam seleksi peserta Pelayaran Kebangsaan IV*.
- Kaplan, L. (1992). *Education and the Family*. MA: Allyn and Bacon, Longwood Division.
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- O'neil, W. F. (2001). *Ideologi-ideologi pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Political & Economic Risk Consultancy. (2016). *Perceptions of corruption in Asia, the US and Australia*. Hong Kong.
- Transparency International. (2015). *Corruption Perceptions Index 2015*. Retrieved from <https://www.transparency.org>